

## ETNONASIONALISME PAGUYUBAN PASUNDAN DALAM ASAS TUNGGAL PANCASILA 1980 – 1990

( *Dari Pergerakan Politik ke Sosial Budaya* )

**OOM KOMALA SANDY**

Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
Email : [oomsandy@mhs.unesa.ac.id](mailto:oomsandy@mhs.unesa.ac.id)

**Sumarno**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya

### Abstrak

Paguyuban Pasundan merupakan organisasi yang memiliki latar belakang etnis yang menimbulkan adanya etnonasionalisme dalam pergerakannya. Sejak terbentuknya hingga masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Paguyuban Pasundan menunjukkan etnonasionalismenya dengan tetap berpartisipasi dalam perpolitikan nasional. Sejak 1959 Paguyuban Pasundan memilih untuk mengarahkan pergerakannya dalam bidang sosial budaya. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan Asas Tunggal Pancasila sebagai salah satu penggunaan nasionalisme untuk alat stabilisasi. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi etnonasionalisme dalam pergerakan politik Paguyuban Pasundan, pandangan dan reaksi Paguyuban Pasundan terhadap Asas Tunggal Pancasila serta etnonasionalisme dalam pergerakan sosial budaya Paguyuban Pasundan pada masa penerapan Asas Tunggal Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Paguyuban Pasundan merupakan organisasi yang menerima Pancasila sebagai asas dalam pergerakannya. Penyesuaian terhadap peraturan tersebut dibuktikan dengan tercantumnya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada AD/ART Paguyuban Pasundan. Dalam pelaksanaannya Paguyuban Pasundan memilih untuk mengutamakan aktifitasnya dalam bidang pendidikan sebagai jalan untuk menunjukkan etnonasionalismenya yang disesuaikan dengan nasionalisme yang ditetapkan pemerintah sebagai jalan menuju integrasi nasional.

**Kata Kunci** : Paguyuban Pasundan, Etnonasionalisme, Asas Tunggal Pancasila

### Abstract

*Paguyuban Pasundan is an ethnically diverse organization that gives rise to ethnonationalism in its movement. Since its formation in 1914 until the period of struggle to maintain the independence, Paguyuban Pasundan show its ethnonationalism by still participating in national politics. Since 1959 Paguyuban Pasundan has chosen to direct its movement in the field of socio-cultural. Along with this, the Orde Baru government issued a single principle policy of Pancasila as one of the use of nationalism for stabilization. This research tries to identify ethnonationalism in political movement Paguyuban Pasundan, view and reaction of Paguyuban Pasundan towards a single principle of Pancasila and also ethnonationalism in socio-cultural movement of Paguyuban Pasundan during the application of a single principle of Pancasila. This research uses historical research methods consisting of four stage of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The result showed that Paguyuban Pasundan is an organization that accepted Pancasila as a principle in its movement. Adjustment to the regulation is evidenced by the inclusion of Pancasila as the single principle in the life of society, nation and state in articles of Association and bylaws of Paguyuban Pasundan. In its implementation Punduuban Pasundan chose to prioritize its activities in the field of education as a way to show its etnationalism in accordance with nationalism set by the government as a road to national integration.*

**Keyword** : Paguyuban Pasundan, Ethnonationalism, The Single Principle of Pancasila

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam perbedaan, oleh karena itu sejak kemerdekaannya Indonesia memutuskan membentuk negara kesatuan yang berbentuk republik dengan mempersatukan berbagai macam perbedaan tersebut dibawah semboyan *Bhineka Tunggal Ika*. Penyatuan dibawah naungan negara republik tidak cukup untuk mengatasi berbagai konflik yang timbul akibat perbedaan. Kenyataan menunjukkan bahwa kemerdekaan tidak menghapus dominasi perbedaan sebagai salah satu penyebab timbulnya konflik di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menyebabkan adanya kategorisasi dan perkembangan secara heterogen sehingga bangsa Indonesia terus dihadapkan pada kenyataan keberagaman, baik dalam hal etnis, ras, adat, maupun agama. Keberagaman sering kali menjadi ancaman terhadap integritas negara, terutama keberagaman etnis yang sering menjadi sorotan dalam kasus kasus disintegrasi di Indonesia.

Keberadaan berbagai macam etnis yang memiliki keharusan untuk hidup bersama dalam naungan sebuah negara menyebabkan munculnya solidaritas dan etnonasionalisme dari masing masing etnis tersebut. Termasuk etnis Sunda sebagai etnis yang menempati urutan kedua sebagai etnis dengan penduduk dalam jumlah terbanyak di Indonesia. Etnis Sunda terus menunjukkan etnonasionalismenya di tengah semangat kebangsaan Indonesia. Etnonasionalisme etnis Sunda telah ditunjukkan sejak masa pergerakan nasional. Pada era pergerakan nasional, perjuangan meraih kemerdekaan ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi modern yang dipelopori oleh kelompok priyayi Jawa dan pejabat pejabat yang memandangi pendidikan sebagai kunci menuju kemajuan.<sup>1</sup> Paguyuban Pasundan merupakan salah satu organisasi yang terbentuk pada periode pergerakan nasional. Hingga masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Paguyuban Pasundan menunjukkan etnonasionalismenya dalam perjuangan di wilayah Pasundan disertai dengan pergerakan di bidang politik. Sejak 1959 barulah Paguyuban Pasundan memutuskan bergerak dalam bidang sosial budaya. Paguyuban Pasundan sebagai organisasi yang

memiliki semangat etnonasionalisme dapat terlihat dari pergerakan yang menitikberatkan lingkup lokal (wilayah pasundan), dan keanggotaan yang didominasi oleh etnis Sunda.

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan keberagaman etnisnya, termasuk berbagai macam konflik yang disebabkan oleh keberagaman tersebut. Adanya beragam etnis dengan solidaritas dan semangat etnisitas masing masing menyebabkan etnonasionalisme tidak dapat dihilangkan dari bangsa yang sudah bersatu dalam naungan Indonesia.

Orde Baru merupakan fase yang panjang sebagai pelaksana roda pemerintahan paling lama dalam sejarah di Indonesia. Rezim orde baru tidak terlepas dari masalah keberagaman yang mengancam integritas negara. Kebijakan merupakan salah satu media bagi pemerintah untuk mengendalikan arus kehidupan bangsa, oleh karena itu adanya ancaman yang timbul dari keberagaman yang ada di Indonesia menjadikan pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan untuk mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari adanya ancaman terhadap integritas, baik integritas negara maupun pemerintah. Kebijakan tersebut salah satunya ditempuh dengan menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara dan satu satunya asas bagi organisasi politik dan kemasyarakatan.

Kebijakan ini tentu mengundang pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat, tidak terkecuali organisasi masyarakat. Penetapan Pancasila sebagai satu satunya asas bagi organisasi politik dan masyarakat tentu akan mengakibatkan perubahan terhadap arah pergerakan organisasi organisasi tersebut. Paguyuban Pasundan sebagai organisasi masyarakat yang sedang mengalami perkembangan pada masa Orde Baru tentu mengambil bagian dari diterapkannya kebijakan Asas Tunggal Pancasila, Paguyuban Pasundan merupakan organisasi kedaerahan yang berdiri atas adanya etnonasionalisme sedangkan kebijakan Asas Tunggal Pancasila merupakan kehendak pemerintah untuk mewujudkan nasionalisme bangsa Indonesia secara utuh dan tunggal. Hal tersebut menimbulkan kemenarikan khusus mengenai Paguyuban Pasundan dengan etnonasionalismenya memandang kebijakan Asas Tunggal Pancasila dengan fakta bahwa Paguyuban Pasundan merupakan organisasi etnis yang terus

<sup>1</sup> M.C. Ricklefs.1998. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hal: 248

tumbuh dan mengembangkan segala potensi yang berasal dari etnis Sunda hingga tahun 2018 ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dirumuskan pertanyaan sebagai berikut: 1). Bagaimana etnonasionalisme Paguyuban Pasundan dalam pergerakan politik sebelum penerapan Asas Tunggal Pancasila? 2). Bagaimana pandangan dan reaksi Paguyuban Pasundan terhadap kebijakan Asas Tunggal Pancasila? 3). Bagaimana etnonasionalisme dalam pergerakan sosial budaya Paguyuban Pasundan setelah diterapkannya Asas Tunggal Pancasila?

Penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa menambah kelengkapan topik dari penulisan sejarah yang telah ada sebelumnya, khususnya tentang Paguyuban Pasundan yang dirasa masih sangat terbatas, sebagai materi dalam pembelajaran mengenai sejarah pergerakan nasional Indonesia, dan dapat memberikan pembelajaran bagi masyarakat bahwa semangat etnisitas dapat dikembangkan secara positif untuk kepentingan etnis.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sejarah, dalam penelitian skripsi ini penulis melakukan tahapan penelitian sejarah yang dirinci sebagai berikut :

### 1. Heuristik (Mengumpulkan Sumber)

Tahap ini penulis memulai mencari dan mengumpulkan data data yang berkaitan langsung maupun tidak langsung untuk dijadikan sumber primer maupun sekunder yang relevan dengan kajian penulis. Adapun rincian penjelasan mengenai sumber-sumber yang diperoleh adalah sebagai berikut: Lembaran Negara Republik Indonesia, UU No.8 Tahun 1985 mengenai Organisasi Kemasyarakatan dan penjelasannya. Dokumen tersebut ditemukan di Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya bagian Referensi. Penulis juga memperoleh Anggaran Dasar Organisasi Paguyuban Pasundan tahun 1980-2000, Surat Keputusan menteri kehakiman tahun 1992 mengenai pengesahan Anggaran Dasar Paguyuban Pasundan yang sesuai dengan UU No.8 Tahun 1985. Selain itu penulis juga memperoleh sebuah catatan dari organisasi Paguyuban Pasundan yang merangkum perjuangan Paguyuban Pasundan dalam periode 1914-2000 yang berjudul "Paguyuban Pasundan ( Kiprah dan Perjuangannya dari Zaman ke Zaman 1914-2000)". Untuk melengkapi pengumpulan sumber, penulis melakukan kegiatan wawancara dengan Bapak Iip D Yahya sebagai salah satu narasumber yang direkomendasikan oleh organisasi Paguyuban Pasundan secara langsung.

Bapak Iip D Yahya merupakan salah satu anggota Paguyuban Pasundan dan juga seorang penulis yang telah berpengalaman dalam penulisan mengenai organisasi Paguyuban Pasundan.

### 2. Kritik Sumber (Menguji Sumber)

Kritik Sumber adalah melakukan penelitian tentang keaslian dan kredibilitas sumber, melalui kritik ekstern dan intern. Kritik ekstren atau otentitas dilakukan untuk mengetahui tingkat keaslian sumber data. Hal ini dilakukan untuk menyeleksi segi-segi fisik dari sumber data tersebut, sehingga diperoleh keyakinan bahwa penelitian telah dilakukan dengan menggunakan data yang tepat. Penelitian ini tidak menggunakan kritik ekstern, proses kritik sumber hanya menggunakan kritik intern. Kritik intern atau pengujian kredibilitas dilakukan untuk meneliti isi sumber dan menelaahnya menjadi fakta yang sudah dianggap benar.

Kegiatan kritik intern dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah pertama, memisahkan sumber yang diperoleh secara langsung dari organisasi Paguyuban Pasundan dengan sumber lain yang diperoleh dari luar organisasi tersebut. Proses kritik dilakukan dengan menguji kredibilitas dari masing masing sumber yang diperoleh untuk dijadikan fakta. Selanjutnya peneliti membandingkan fakta fakta tersebut untuk memperoleh keterarahan pada satu fakta dan menarik benang merah dari fakta-fakta yang tersebar dalam sumber-sumber tersebut.

### 3. Interpretasi (Analisis Fakta)

Interpretasi ialah yaitu penafsiran terhadap fakta yang telah teruji kebenarannya. Tahap ini penulis menafsirkan fakta sejarah dengan menghubungkan dan merangkai fakta satu dengan yang lainnya sehingga muncul hubungan yang rasional antar fakta tersebut. Dalam menginterpretasi fakta, hal pertama yang dilakukan adalah, menyusun semua fakta yang diperoleh. Selanjutnya penulis merangkai fakta fakta tersebut dan meninjau fakta tersebut dalam berbagai buku referensi.

### 4. Historiografi

Historiografi adalah penulisan hasil penelitian menjadi rekonstruksi sebuah cerita dengan mengorganisasikan materi, peletakan dasar pandangan dari sudut masa lalu. Penulisan dilakukan setelah merangkai fakta-fakta yang diperoleh dalam tahapan sebelumnya. Penulisan dilakukan ke dalam bentuk tulisan deskriptif analitis secara logis, kronologis dan sistematis sesuai dengan kaidah ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Etnonasionalisme dalam Pergerakan Politik Paguyuban Pasundan.

Sebagai etnis dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia, Etnis Sunda turut menunjukkan eksistensinya pada masa pergerakan nasional di Indonesia. Salah satu bentuk partisipasi orang Sunda adalah dengan mengikuti organisasi BO yang terbuka bagi orang-orang yang berada di Pulau Jawa. Kala itu di kalangan orang Sunda belum tumbuh semangat kedaerahan, mengingat bahwa organisasi ini bersifat umum dari segi asas, tujuan dan keanggotaan. Kalangan orang Sunda yang berpartisipasi dalam organisasi Budi Utomo pada saat itu kurang memiliki kedudukan yang penting. Di Jakarta orang Sunda yang bergabung dalam BO tidak banyak dan di Bandung dibentuk cabang BO. Pada tahun 1910 jumlah anggota cabang BO di Bandung mencapai 500 orang, sedangkan anggota cabang di Bogor yang didirikan pada tahun itu berjumlah 150 orang, namun jumlah anggota di kedua cabang tersebut menurun drastis pada tahun berikutnya, di Bandung bahkan sudah tidak memiliki anggota lagi dan di Bogor hanya tersisa 25 orang.<sup>2</sup> Keluarnya anggota dari cabang BO di Bandung dan Bogor yang merupakan dominasi orang Sunda disebabkan karena ketidakpuasan mereka terhadap organisasi BO yang dianggap hanya mementingkan orang Jawa Tengah dan Jawa Timur saja jika dipandang dari sudut sosial-budaya.

Paguyuban Pasundan mengawali kelahirannya dari lingkungan sekolah STOVIA. Terbentuknya organisasi Paguyuban Pasundan tidak terlepas dari kegiatan perkumpulan murid-murid Sunda di STOVIA. Kegiatan 'kumpul-kumpul' tersebut semakin lama timbul perasaan cinta terhadap daerah, bahasa dan budaya Sunda. Selain itu terbentuknya organisasi BO juga mendorong orang-orang Sunda untuk melakukan hal yang sama. Mereka merasakan perlunya persatuan antara orang-orang Sunda terlebih mereka yang berada di luar daerahnya. Mereka mempunyai keyakinan bahwa orang Sunda harus bersatu dan yang mempersatukan harus orang Sunda sendiri.

Berdasarkan pasal-pasal yang memuat tujuan dan anggaran dasar organisasi, pada awal pembentukannya Paguyuban Pasundan menitikberatkan pergerakan yang berusaha memajukan kehidupan masyarakat di Tanah Sunda dalam berbagai bidang. Hal ini disertai pula dengan komitmen untuk tidak ikut dalam perpolitikan negara, sehingga dapat dikatakan bahwa organisasi ini belum memiliki perhatian terhadap bidang politik dan nasionalisme Indonesia. Pemikiran tersebut berubah sejak dirikannya Volksraad dan dewan di bawahnya

pada tahun 1918. Paguyuban Pasundan mulai aktif dalam kegiatan politik. Paguyuban Pasundan tentu saja menyambut baik adanya Volksraad sebagai dewan perwakilan rakyat pada masa pergerakan nasional. Paguyuban Pasundan termasuk organisasi yang bersifat kooperatif dengan pemerintah kolonial. Paguyuban Pasundan mempercayai janji pemerintah kolonial mendidik bangsa Indonesia untuk merdeka. Paguyuban Pasundan meyakini bahwa kemerdekaan dapat dicapai melalui proses evolusioner dan damai. Partisipasi Paguyuban Pasundan dalam Volksraad ditandai dengan diangkatnya anggota-anggota Paguyuban Pasundan dalam Volksraad. Bahkan pada tahun 1924, Paguyuban Pasundan telah disahkan sebagai organisasi yang berhak mempunyai wakil di Volksraad, Dewan Provinsi, Dewan Kabupaten dan Kota Madya.<sup>3</sup>

Selain berpartisipasi dalam politik kooperatif yang diadakan oleh pemerintah kolonial, Paguyuban Pasundan juga mendukung nasionalisme dalam bentuk gagasan persatuan nasional. Nasionalisme memasuki Indonesia diawali dengan kembalinya pelajar-pelajar anggota PI ke Indonesia yang membawa ideologi tersebut pada pertengahan 1923.<sup>4</sup> Ide-ide persatuan nasional mulai muncul sebagai buah dari berkembangnya nasionalisme di Indonesia dan mulai menyebar secara intensif. Ide tersebut tertuang dalam suatu rencana pembentukan suatu badan yang mempersatukan partai-partai politik dalam satu wadah.

Sebagai bagian dari Indonesia, Paguyuban Pasundan tidak menutup diri dan bersedia bergabung dalam beberapa bentuk wadah perkumpulan berbagai organisasi di Indonesia. Dalam mengikuti perkumpulan yang menyatukan berbagai macam organisasi di Indonesia, Paguyuban Pasundan memilih bentuk federasi dan menghindari bentuk fusi. Paguyuban Pasundan menganggap bahwa pemahaman mengenai bentuk fusi dan federasi akan mampu membuat mereka memilih kebijakan yang tepat terkait dengan usulan pembentukan fusi bagi organisasi-organisasi di Indonesia, sehingga keputusan yang diambil dapat mencapai tujuan Paguyuban Pasundan tanpa mengurangi tujuan persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Dengan pertimbangan tersebut Paguyuban Pasundan mendukung persatuan-persatuan partai politik dalam bentuk federasi. Mengenai bentuk fusi, Paguyuban memandang bahwa pembentukan fusi diantara

<sup>3</sup> R. Djaka Soeryawan. 1990. *Sejarah Berdirinya Paguyuban Pasundan*. Bandung: Lembaga Kebudayaan Universitas Pasundan. Hal: 43

<sup>4</sup> Suhartono. 1994. *Sejarah Pergerakan Nasional (Dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 58

<sup>2</sup> Suharto. 2002. *Pagojeoban Pasoendan 1927-1942*. Bandung: Satya Historika. Hal:43

organisasi politik tidak akan membawa hasil yang diharapkan.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk fusi yang mengalami penolakan oleh Paguyuban Pasundan adalah PARINDRA (Partai Indonesia Raya). Paguyuban Pasundan memandang bahwa Paguyuban Pasundan memiliki tujuan utama yang berbeda dengan organisasi lain yang mengutamakan politik. Paguyuban Pasundan menganggap bahwa politik merupakan alat untuk mencapai perbaikan di bidang ekonomi, sosial dan lainnya.<sup>6</sup> Selain itu Paguyuban Pasundan juga mengkhawatirkan apabila bentuk fusi tidak bertahan dalam waktu yang lama dan dampaknya akan berimbas pada Paguyuban Pasundan yang akan ikut hilang apabila fusi tersebut mengalami kekacauan. Meskipun demikian, Paguyuban Pasundan bersedia untuk bermufakat dalam perkumpulan yang berbentuk federasi, seperti PPPKI (Permusyawaratan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia), BAPPEPI (Badan Perantara Partai Politik Indonesia) dan GAPI (Gabungan Politik Indonesia). Komitmen Paguyuban Pasundan untuk selalu mendukung bentuk federasi dikarenakan bentuk federasi memberikan kebebasan bagi organisasi yang tergabung di dalamnya untuk melaksanakan program kerja dan mewujudkan cita-citanya. Paguyuban Pasundan dalam hal ini berjuang untuk kepentingan bersama mengenai kemerdekaan Indonesia, tetapi dalam bekerjasama dengan organisasi organisasi pergerakan lainnya Paguyuban Pasundan tetap ingin mempertahankan kemandiriannya. Paguyuban Pasundan sebagai organisasi yang memiliki asas dan tujuan yang mapan mendukung persatuan dengan jalan federasi, demikian cita-cita Paguyuban Pasundan mengenai pembangunan Persatuan Indonesia.<sup>7</sup>

Sejak berdirinya sampai dengan masuknya pemerintahan Jepang ke Indonesia pada tahun 1942, Paguyuban Pasundan mengalami gejolak dari perkumpulan mulanya bertujuan yang bersifat lokal hingga pergerakan politik nasional yang penuh kesadaran. Pada 20 Maret 1942 pemerintah Jepang mengeluarkan peraturan yang membubarkan segala bentuk organisasi yang ada di Indonesia. Sampai proklamasi kemerdekaan hingga masa mempertahankan Indonesia dari Belanda yang kembali berkuasa. Paguyuban Pasundan tidak menunjukkan aktifitas-aktifitas yang berarti setelah dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Paguyuban Pasundan kembali muncul karena

timbulnya rumor tentang Negara Pasundan yang terbentuk pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS adalah suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar: Republik Indonesia, *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO), dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh *United Nations Commission for Indonesia* (UNCI) sebagai perwakilan PBB.<sup>8</sup>

Pada pembentukan Negara Pasundan sebagai bagian dari RIS, terdapat sebuah kontrofersi. Kontrofersi tersebut terkait dengan adanya keinginan untuk membentuk Negara Pasundan yang merdeka dan terpisah dari Republik Indonesia. Kontrofersi tersebut menimbulkan adanya versi mengenai Negara Pasundan. Pertama, Negara Pasundan Federalis, yang diprakarsai oleh Soeria Kartalegawa beserta partainya yang bernama Partai Rakyat Pasundan (PRP) yang dibentuk oleh Belanda.<sup>9</sup> Kedua, Negara Pasundan Republikan dipimpin oleh Raden Aria Wiranatakusumah. Sikap politik yang berbeda terkait dua versi Negara Pasundan tersebut adalah Negara Pasundan; federalis, memiliki sikap mendukung Indonesia Serikat. Dan republikan, yang mendukung Republik Indonesia dan menolak Indonesia Serikat.<sup>10</sup> Keterlibatan para tokoh republikan pada Negara Pasundan sebagai bagian dari RIS, lebih merupakan strategi politik agar wilayah Pasundan tidak lepas dari Republik Indonesia. Adanya permasalahan mengenai Negara Pasundan tersebut menimbulkan keresahan dari kalangan tokoh Paguyuban Pasundan. Diantara rumor-rumor yang beredar mengenai Negara Pasundan, terdapat pernyataan bahwa PRP merupakan kelanjutan dari Paguyuban Pasundan.

Adanya rumor tersebut menjadikan tokoh-tokoh Paguyuban Pasundan merasa dicemarkan. Hal ini terkait bahwa Paguyuban Pasundan terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis, dan perjuangan organisasi ini telah mengalami pasang surut mengiringi kemerdekaan Indonesia, sehingga rumor bahwa Paguyuban Pasundan membelokkan diri menjadi kelompok yang ingin memisahkan diri dari Indonesia menimbulkan keresahan. Oleh karena itu pada tahun 1947 Paguyuban Pasundan berdiri kembali sebagai organisasi yang jelas memiliki Anggaran Dasar yang disesuaikan dengan UUD 1945. Pendirian kembali organisasi ini merupakan bentuk pernyataan bahwa Paguyuban Pasundan bukan bagian dari PRP yang

<sup>5</sup> Suharto. *Op.Cit.*, Hal: 57

<sup>6</sup> *Ibid.*,

<sup>7</sup> Pidato Pembukaan R.Oto Iskandar di Nata dalam kongres Pasundan ke-22 di Cirebon (25-28 Maret 1937) yang dimuat dalam Sipatahoenan - 31 Mare dan 1 April 1937 (dalam Suharto.*Ibid.*, Hal:61

<sup>8</sup> Sekretariat Negara RI. 1986. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949*. Hal: 243-244

<sup>9</sup> PB Paguyuban Pasundan. 2000. *Paguyuban Pasundan (Kiprah dan Perjuangannya dari Zaman ke Zaman 1914-2000)*. Bandung : PB Paguyuban Pasundan. Hal:257

<sup>10</sup> Sekretariat Negara RI. *Op.,Cit*

menginginkan Negara Pasundan merdeka dari Republik Indonesia. Paguyuban Pasundan berdiri kembali di tiga kota yaitu di Bandung, Jakarta dan Yogyakarta. Bandung ditetapkan sebagai Pusat Paguyuban Pasundan. Untuk lebih memantapkan perjuangannya dalam membela kemerdekaan RI Paguyuban Pasundan mengadakan kongres pada 29, 30, 31 Januari 1949 di Bandung yang menghasilkan keputusan untuk mengubah nama Paguyuban Pasundan menjadi PARKI (Partai Kebangsaan Indonesia), selain itu Pancasila dicantumkan sebagai asas dalam anggaran dasarnya.<sup>11</sup>

PARKI sebagaimana partai lain, turut berpartisipasi dalam kegiatan politik nasional melalui demokrasi melalui Pemilu, namun PARKI menghadapi Pemilu tersebut. PARKI tidak banyak memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Bahkan di wilayah Jawa Barat, PARKI hanya mampu memperoleh 16.000 suara, berada di bawah partai sesamanya dari Jawa Barat yaitu GERPIS (Gerakan Pilihan Sunda).<sup>12</sup> Hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang kembalinya PARKI menjadi Paguyuban Pasundan, disertai penyesuaian dasar dan tujuannya. Pendapat tersebut menimbulkan pertentangan-pertentangan berbagai pihak dalam tubuh PARKI. Pada akhirnya melalui sebuah referendum pada tanggal 29 November 1959 PARKI kembali menjadi Paguyuban Pasundan.

Seiring dengan dikeluarkannya dekret presiden 5 Juli 1959, dan PARKI mengubah nama menjadi Paguyuban Pasundan, organisasi ini menginginkan untuk memfokuskan diri dalam bidang pendidikan dan sosial budaya. Dalam bidang pendidikan Bale Pendidikan PARKI berganti nama menjadi Badan Pendidikan dan Pengajaran (BPP) Pasundan. Perkembangan kegiatan di bidang pendidikan dibawah nama Paguyuban Pasundan semakin meningkat hingga pada tahun 1960 Paguyuban Pasundan berhasil mendirikan sebuah universitas yang diberi nama Universitas Pasundan. Universitas Pasundan merupakan perguruan tinggi swasta pertama yang berdiri di Jawa Barat.<sup>13</sup>

Dalam pergolakan nasional pada beberapa tahun menjelang akhir pemerintahan Orde Lama, Paguyuban Pasundan turut mencurahkan perhatiannya pada keadaan sosial masyarakat Indonesia pasca dikeluarkannya dekret yang tergolong cukup mengkhawatirkan, terutama masyarakat yang hidup di daerah pedalaman dengan berpartisipasi pada penyelesaian-penyelesaian berbagai konflik dalam pergolakan tersebut. Dalam pemberontakan yang dilakukan

oleh kelompok DI/TII dibawah pimpinan panglima tertingginya Sekarmadji Maridjan (SM) Kartosuwiryo untuk mengatasi gangguan keamanan ini banyak anggota Paguyuban Pasundan yang bergabung dengan Organisasi Pertahanan Rakyat (OPR). Begitu pula pada saat kodan VI/Siliwangi tahun 1960 mulai mengadakan operasi "Pagar Betis" yang mengikutsertakan seluruh kekuatan rakyat, banyak anggota Paguyuban Pasundan yang berpartisipasi melaksanakan pagar betis.<sup>14</sup>

Gejolak sosial politik selanjutnya adalah adanya sebuah gerakan yang dilakukan oleh PKI (Partai Komunis Indonesia) yang dikenal dengan nama G 30 S/PKI pada tahun 1965. Munculnya PKI dengan gerakan pemberontakan tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap paham komunisme yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. menghadapi issue komunisme yang kian meluas, Paguyuban Pasundan menyelenggarakan kongres ke-32 pada tahun 1965 di Bandung. Untuk menunjukkan bahwa Paguyuban Pasundan tidak sepeham dengan PKI, pada kongres ini Paguyuban Pasundan merubah asas perjuangan dalam anggaran dasarnya, yaitu : "Organisasi berasaskan Pancasila dengan Islam sebagai asas ketuhanannya".<sup>15</sup>

Situasi politik di Indonesia pasca terjadinya pemberontakan oleh PKI tersebut mengalami pergolakan antara pihak yang ingin tetap mempertahankan status quo dan pihak yang ingin menegakan Orde Baru. Hal tersebut berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, demikian pula bagi pengurus besar Paguyuban Pasundan. Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat menjadi pertimbangan yang cukup besar bagi Paguyuban Pasundan untuk menentukan kebijakan didalam mengelola bidang garapannya. Sebagai pihak yang merasa memerlukan segala perbaikan dalam kondisi negara Indonesia, Paguyuban Pasundan yang jajarannya terdiri dari dosen, guru, dan unsur-unsur lainnya berpartisipasi dalam kesatuan aksi yang memprotes G 30 S/PKI pada 10 Januari 1966 bersama mahasiswa dan pelajar.<sup>16</sup>

Dengan masuknya Indonesia pada pemerintahan baru yang disebut dengan rezim Orde Baru, rezim tersebut berusaha untuk melaksanakan pembangunan berncaha unruk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Paguyuban Pasundan yang berada di Provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu provinsi dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama-sama dengan Provinsi dan

<sup>11</sup> R. Djaka Soeryawan, *Op.cit.*, Hal:69

<sup>12</sup> R. Djaka Soeryawan, *Op.cit.*,

<sup>13</sup> PB Paguyuban Pasundan. 2000. *Op, Cit.*, Hal: 324

<sup>14</sup> PB Paguyuban Pasundan. 2000. *Op, Cit.*, Hal: 327-328

<sup>15</sup> PB Paguyuban Pasundan. 2000. *Op, Cit.*, Hal: 329

<sup>16</sup> PB Paguyuban Pasundan. 2000. *Op, Cit.*, Hal: 330

organisasi kemasyarakatan lainnya turut aktif dalam gerak pembangunan nasional yang dicanangkan oleh Orde Baru dengan Repelitanya. Sebagaimana Indonesia dengan pemerintahan baru yang memulai pembangunan dan perbaikan dalam segala aspek kehidupan, Paguyuban Pasundan pun memulai mengembangkan kembali kegiatan-kegiatannya seiring dengan situasi sosial dan politik di Indonesia yang mulai mengarah pada kestabilan.

#### **B. Paguyuban Pasundan Menuju Pergerakan Sosial Budaya**

Kegagalan PARKI dalam panggung politik dan memutuskan untuk mundur dari perpolitikan Indonesia pada tahun 1959, dengan nama Paguyuban Pasundan organisasi ini menapaki kembali perjuangan dari awal sebagai organisasi baru yang merintis pergerakan dalam bidang sosial budaya. Keadaan politik, sosial, dan ekonomi Indonesia mengalami banyak gejolak yang mengkhawatirkan dengan terjadinya berbagai pemberontakan pada akhir pemerintahan Orde Lama mempengaruhi pergerakan Paguyuban Pasundan. Pada dekade awal kembalinya nama Paguyuban Pasundan, organisasi ini tidak menunjukkan langkah yang mantap selain pendirian UNPAS. Kesulitan untuk memunculkan inovasi dalam pergerakan sosial budaya tersebut kemudian menimbulkan kehendak dalam Paguyuban Pasundan untuk melakukan reformasi sistem dalam tubuh Paguyuban Pasundan.

Pada kepengurusan tahun 1968-1974 Paguyuban Pasundan mencoba menerapkan sistem organisasi dengan mengangkat seorang koordinator yang secara tunggal mengkoordinir pengelolaan bidang-bidang garapan di lingkungan Paguyuban Pasundan, dengan harapan agar hasilnya lebih memuaskan, koordinator dipercayakan kepada MR. Koesna Poeradiredja.<sup>17</sup> Seiring dengan berkembangnya aktifitas Paguyuban Pasundan dalam bidang sosial-budaya, upaya menunjuk koordinator untuk menangani badan-badan garapan dalam tubuh Paguyuban Pasundan secara bertahap menunjukkan keberhasilannya dalam perintisan pergerakan organisasi. Sistem koordinator ini hanya berlangsung sampai berakhirnya kepengurusan periode 1968-1974 karena badan garapan Paguyuban Pasundan diharapkan akan bertambah sehingga dibentuk kepengurusan yang terbagi setiap bidang garapannya. Sesudah kongres Bogor tahun 1974 sistem koordinator tersebut dihilangkan. Penggunaan istilah Ketua Umum mulai digunakan dalam kepengurusan hasil kongres ini, karena dibawahnya ada beberapa ketua yang mendampinginya. Demikian pula dengan sebutan Sekretaris Umum.

Seiring dengan langkah organisasi yang semakin mantap, perhatian anggota terhadap organisasi pun semakin meningkat. Adanya reformasi melalui berbagai penajakan dalam kepengurusan Paguyuban Pasundan, kemudian membawa kemajuan bagi organisasi. Paguyuban Pasundan memiliki sistem kepengurusan yang baru, sebagai langkah dasar untuk memulai penyelenggaraan program kerja Paguyuban Pasundan dalam bidang sosial dan budaya.

Kongres ke-35 tahun 1978 yang diselenggarakan tepat waktu sesuai Anggaran Dasar 4 tahun sekali bertempat di kampus UNPAS Jalan Lengkong Besar-Bandung. Dalam kongres ini mulai tampak persaingan yang inkonstitusional sehingga membawa perpecahan di kalangan anggota hingga nyaris retaknya persaudaraan dan tali silaturahmi. Pada masa kongres itu muncul dua kelompok, salah satu kelompok ingin menjadikan Adjam Sjamsoepradja sebagai ketua umum, sedangkan kelompok lainnya ingin menjadikam Wigandi Wangsaatmadja sebagai ketua umum. Pemungutan suara dalam kongres mengalami kekacauan, karena beredarnya kartu suara palsu yang menyebabkan hasil pemungutan suara dianggap tidak sah. Akhirnya atas perhatian dari kedua belah pihak, diambil kesepakatan bahwa untuk jabatan ketua umum diserahkan kepada pihak ketiga. Kedua belah pihak sepakat untuk mengangkat R. Kendo Sukanda Bratamanggala sebagai ketua umum Paguyuban Pasundan masa bakti 1978/1979-1983.<sup>18</sup>

Sesuai dengan AD/ART Paguyuban Pasundan pada masa bakti 1978/1979-1983 kongres dilangsungkan kembali pada 1983 di Salabintana – Sukabumi. Kericuhan pada kongres ke-35 tahun 1978 di Bandung terulang kembali dalam kongres ke-36 di Salabintana – Sukabumi ini bahkan lebih parah lagi.<sup>19</sup> Pada hari pertama dan kedua kongres berjalan dengan lancar tanpa rintangan dan gangguan yang berarti. Beberapa keputusan sudah ditetapkan oleh Kongres, antara lain Tata Tertib Kongres, Aturan Pemilihan Formatur, *Palanggeran Garapan Paguyuban Pasundan* (PGPP), AD/ART Paguyuban Pasundan dalam dua bahasa yaitu Bahasa Sunda dan Bahasa Indonesia, termasuk pertanggungjawaban pengurus besar masa bakti tahun 1978/1979-1983 sudah di sahkan. Menginjak pada acara pemilihan pengurus, hari ketiga mulai muncul permasalahan. Aturan main yang berkaitan dengan pemilihan pengurus yang telah ditetapkan dalam kongres pada hari hari sebelumnya, oleh satu pihak tidak diindahkan, sedangkan oleh pihak lainnya dipegang teguh. Sampai kongres berakhir dan

<sup>17</sup> PB Paguyuban Pasundan. 2000. *Ibid.*, Hal: 332-333

<sup>18</sup> PB Paguyuban Pasundan. 2000. *Ibid.*, Hal: 336

<sup>19</sup> PB Paguyuban Pasundan. 2000. *Ibid.*,

bubar kepengurusan yang disahkan oleh kongres tidak sempat terbentuk.

Diluar kongres kedua belah pihak yang bersengketa itu masing-masing membentuk/menyusun kepengurusan sendiri-sendiri yang kedua-duanya mengatasnamakan dirinya sebagai pengurus besar Paguyuban Pasundan yang sah. Kelompok pertama dipimpin oleh Adjam Sjamsoepradja yang berpegang teguh pada putusan-putusan kongres, sedangkan kelompok lain dipimpin oleh R.K.S. Bratamanggala yang masuk mengaku bahwa dirinya ialah Ketua Umum Paguyuban Pasundan merangkap Ketua Yayasan Pendidikan Pasundan.

Permasalahan kemelut di tubuh Paguyuban Pasundan itu kemudian dibawa kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk dimintai uluran tangganya ikut menengahi dan menggulangnya. KLB yang dipimpin oleh Wagub, H.Aboeng Koesman, ini memilih dan menetapkan Prof.Dr.Ir.H.Toyib Hadiwidjaja sebagai Ketua Umum. Selanjutnya Kongres memberi tugas tunggal kepada Pengurus Besar Payuban Pasundan hasil KLB yaitu harus mengupayakan *Rekonsiliasi* yang meliputi: Rehabilitasi, Restrukturisasi, Inovasi, Konsolidasi, dan Pengembangan.<sup>20</sup> Rekonsiliasi tersebut merupakan upaya Paguyuban Pasundan untuk mengawali pergerakannya dalam bidang sosial budaya, salah satu contohnya adalah mengubah administrasi status kepemilikan kekayaan (tanah, gedung sekolah, perguruan tinggi, dsb) dari atas nama pemilikan pribadi anggota Pengurus Paguyuban Pasundan menjadi atas nama/milik YPDM Pasundan atau milik YPT Pasundan. Reformasi yang terus dilakukan dalam kepengurusan Paguyuban Pasundan sebagai roda pergerakan organisasi dan rekonsiliasi yang dilakukan pada masa kepemimpinan Prof.Dr.Ir.Toyib Hardiwijaya membawa Paguyuban Pasundan pada kemajuan yang sangat besar dalam pergerakan sosial budaya. Paguyuban Pasundan telah melalui masa penajakan jati diri dan pada tahun-tahun berikutnya Paguyuban Pasundan tampil dengan pasti sebagai organisasi mandiri yang bergerak dalam bidang sosial budaya.

### C. Pandangan dan Reaksi Paguyuban Pasundan terhadap Kebijakan Asas Tunggal Pancasila

Kebijakan Asas Tunggal Pancasila yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru merupakan salah satu cara pemerintah dalam mengontrol gerakan politik di Indonesia untuk mencapai kestabilan nasional. Kebijakan ini menimbulkan gejolak perihal sesuai dan tidaknya Pancasila

dengan pergerakan organisasi. Kebijakan yang dikeluarkan dalam UU No.8 tahun 1985 ini mengharuskan organisasi masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan UU No.8 tahun 1985 paling lambat dua tahun setelah Undang-undang tersebut diberlakukan. Organisasi masyarakat yang tidak menyesuaikan AD/ART-nya dengan undang-undang tersebut tidak akan terdaftar dan mendapat Surat Keputusan Menteri Kehakiman dengan konsekuensi dibubarkan.

Reaksi Pengurus Besar Paguyuban Pasundan mengenai pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila secara umum adalah menerima secara total tanpa kritik. Paguyuban Pasundan tidak keberatan dengan Pancasila yang dijadikan alat sebagai pemersatu bangsa. Paguyuban Pasundan sebagai organisasi yang berbasis etnis Sunda tidak menonjolkan eksklusifitas Sunda ditengah-tengah keberagaman Indonesia. Sebagai organisasi yang berlatarbelakang etnis, Paguyuban Pasundan memiliki tanggung jawab besar terhadap kemajuan budaya dan etnis Sunda ditengah keberagaman di Indonesia. Namun, bentuk tanggungjawab tersebut hanya meliputi kesadaran akan identitas etnis yang mendorong perjuangan untuk kepentingan etnis Sunda. Paguyuban Pasundan tidak memiliki orientasi-orientasi yang menitikberatkan pada sudut pandang budaya Sunda dalam memandang berbagai hal, termasuk dalam memandang keberagaman di Indonesia. Kebersediaan etnis Sunda untuk hidup berdampingan dalam perbedaan dibuktikan dengan tidak adanya konflik etnis yang membawa nama etnis Sunda. Adapun konflik yang biasa terjadi di Jawa Barat tidak dilatarbelakangi oleh motif etnisitas, melainkan motif-motif sosial-ekonomi yang lain.

“Pancasila bukan penghambat bagi Paguyuban Pasundan karena sejak awal Paguyuban Pasundan berdiri bersama organisasi dan *suku* lain, berpadu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bahkan tokoh Paguyuban Pasundan ikut dalam perumusan Pancasila”.<sup>21</sup>

Dalam AD/ART Paguyuban Pasundan yang berlaku sebelum dikeluarkannya UU. No.8 tahun 1985. Paguyuban Pasundan telah mencantumkan Pancasila sebagai asas bagi organisasi tersebut. Anggaran Dasar Paguyuban Pasundan tahun 1980-1985, BAB II tentang Azas jeung Udagan (Azas dan Tujuan), Pasal 2 menyebutkan bahwa:

Azas Paguyuban Pasundan nyaeta Pancasila jeung Undang-Undang Dasar 1945.<sup>22</sup> Terjemahan : Azas Paguyuban

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Iip D. Yahya, Ketua Penulis dan Peneliti di Paguyuban Pasundan pada 24 Juli 2017

<sup>22</sup> PB Paguyuban Pasundan. 1980. *Buku Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Paguyuban Pasundan*. Bandung: PT. Pengharapan Baru. Hal : 4

<sup>20</sup> PB Paguyuban Pasundan. 1990. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Masa Bakti Taun 1985-1990*.



Pasundan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pancasila telah tercantum dalam AD/ART Paguyuban Pasundan sejak kongres pada tanggal 29, 30, 31 Januari 1949. Pada kongres tersebut, Pancasila dicantumkan sebagai asas disertai tujuan-tujuan yang sesuai dengan perkembangan zaman dalam Pasal 2 Anggaran dasarnya.<sup>23</sup>

Pancasila yang telah dicantumkan sebagai asas oleh Paguyuban Pasundan sejak sebelum diberlakukannya Undang-undang No.8 tahun 1985 menyebabkan tidak adanya dinamika yang signifikan pada saat pemerintah mewajibkan peraturan tersebut bagi seluruh organisasi masyarakat. Semua lembaga dan aktifitas yang berada dibawah Paguyuban Pasundan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Selain karena sudah melaksanakan sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, Paguyuban Pasundan menerima pemberlakuan kebijakan tersebut karena secara historis. Paguyuban Pasundan merupakan organisasi yang turut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia, sehingga dalam berbagai usaha yang mendukung persatuan dan pembangunan nasional Paguyuban Pasundan akan selalu mendukung dan ikut serta. Namun sebagai organisasi yang patuh Paguyuban Pasundan tetap menyesuaikan Anggaran Dasarnya kepada UU No. 8 tahun 1985.

Pancasila yang tercantum dalam BAB Asas di Anggaran Dasar Paguyuban Pasundan tentu tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan setelah dikeluarkannya UU. No.8 tahun 1985, namun narasi bunyi pasal dalam BAB tersebut berubah menjadi:

“Asas Paguyuban Pasundan nyaeta Pancasila, hiji-hijina asas dini hirup kumbuh masyarakat, bangsa jeung nagara.<sup>24</sup> Terjemahan: Asas perkumpulan ini adalah Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Dalam hal ini, Pengurus Besar Paguyuban Pasundan tetap berusaha untuk menyesuaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah dalam UU. No.8 tahun 1985 dengan merubah kalimat dalam pasal 2 tersebut sebagaimana yang diminta dalam Undang-undang No. 8 tahun 1985 pasal 2 bahwa Pancasila harus dicantumkan sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### **D. Etnonasionalisme dalam Pergerakan Sosial Budaya Paguyuban Pasundan di bawah Asas Tunggal Pancasila**

Kebijakan Asas Tunggal Pancasila resmi diberlakukan sejak dikeluarkannya Undang-

undang No.8 Tahun 1985. Paguyuban Pasundan sebagai organisasi yang memiliki latar belakang etnis Sunda memberikan dukungan terhadap stabilitas yang diharapkan dapat tercipta melalui penerapan undang-undang tersebut. Komunitas etnis Sunda sebagai komunitas yang lebih dahulu terbentuk dari pada negara Indonesia, memberikan makna terhadap etnonasionalisme dalam kehidupan bernegara, melalui penyesuaiannya terhadap kebijakan yang dikeluarkan demi kepentingan negara salah satunya Kebijakan Asas Tunggal. Adapun kegiatan Paguyuban Pasundan setelah diterapkannya Asas Tunggal Pancasila diprioritaskan dalam bidang pendidikan.

Dalam bidang pendidikan Sejak tahun 1985 hingga tahun 1990 Paguyuban Pasundan mengalami penambahan jumlah sekolah menengah yang berada di bawah YPDM Pasundan. Jumlah kenaikan tersebut terjadi karena adanya penambahan sebanyak 40 unit SLTP dan SLTA yang tersebar di Jawa Barat.<sup>25</sup> Hingga tahun 1995 jumlah sekolah menengah yang berada di bawah naungan YPDM Pasundan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Adapun sekolah-sekolah yang berada di bawah YPDM Pasundan adalah :

Tingkat	Jumlah
Sekolah Dasar	5 Unit
SMP	36 Unit
SMA	30 Unit
STM	3 Unit
SMEA	8 Unit
SMIK	1 Unit
TOTAL	83 Unit

Sejak tahun 1995 di sekolah-sekolah tersebut mulai diadakan program sekolah unggulan.<sup>26</sup>

Pendidikan tinggi mengalami perkembangan yang tidak kalah dengan pendidikan dasar dan menengah. Sejak tahun 1985 hingga 2000 Paguyuban Pasundan terus mengadakan pengembangan pada YPT Pasundan. Pembangunan Universitas Pasundan terus dilakukan dan membuka jurusan-jurusan baru. FKIP yang didirikan pada tahun 1978 yang semula berada di kompleks Cihampelas No. 167 Bandung digabungkan ke Tamansari, dan pada tahun 1995 kampus UNPAS bertambah dengan dibangunnya kampus baru di Jalan Dr. Setyabudhi No. 193. Diluar pembangunan Universitas Pasundan pada tahun 1986, Paguyuban Pasundan mendirikan perguruan tinggi lain, yaitu STKIP Pasundan di Cimahi. Selain itu pada masa bakti PB Pasundan berikutnya, yaitu tahun 1990-1995 Paguyuban Pasundan mendikikan dua perguruan tinggi, STIE

<sup>23</sup> R. Djaka Soeryawan. *Op. Cit.*, Hal: 69

<sup>24</sup> PB Paguyuban Pasundan. 1990. Putusan-Putusan Kongres tahun 1990 jeung Putusan-Putusan Pengurus Besar Paguyuban Pasundan. Hal: 10

<sup>25</sup> PB Paguyuban Pasundan. 2000. *Op. Cit.*, Hal: 351

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Iip D Yahya

(Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Pasundan, dan STH (Sekolah Tinggi Hukum) Pasundan.<sup>27</sup>

Dalam pendidikan dasar dan menengah, perkembangan yang terjadi pada tahun 1985-1995 cukup besar. Adapun jumlah penambahan sekolah pada tahun 1985-1990 sebesar 40 unit, merupakan 36% dari jumlah sekolah yang dimiliki Paguyuban Pasundan saat ini.<sup>28</sup> Angka tersebut menunjukkan bahwa 36% dari jumlah sekolah yang dimiliki Paguyuban Pasundan dibangun pada tahun 1985-1990, angka yang cukup besar dalam jangka waktu lima tahun. Selain itu sejak tahun 1985-1995 Paguyuban Pasundan telah mendirikan tiga perguruan tinggi dalam jangka waktu tersebut. Perguruan tersebut masih berdiri hingga tahun 2017 ini. Adapun jumlah perguruan tinggi yang berada di bawah YPT Pasundan saat ini adalah 4 unit, dan tiga diantaranya didirikan pada tahun 1985-1995.

Usaha-usaha dan pembangunan dalam bidang pendidikan yang dilakukan sejak tahun 1985-1995 merupakan salah satu keinginan Paguyuban Pasundan untuk memenuhi kebutuhan etnisnya dalam hal pendidikan, meskipun penyediaan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi ini tidak khusus diperuntukan untuk anak-anak etnis Sunda, namun ini merupakan usaha untuk menyediakan sarana belajar yang cukup di wilayah Jawa Barat.

Budaya sebagai identitas utama yang mengikat etnis Sunda yang membedakannya dengan etnis lain tidak luput dari perhatian Paguyuban Pasundan sebagai usaha untuk *ngamumule* atau melestarikan apa yang menjadi identitas kelompok etnis ini. Pada tahun 1989 Paguyuban Pasundan mengirimkan misi kesenian ke Jerman Barat tanggal 11-29 September 1989 dipimpin oleh DR. Dadang Sulaeman, Drs. Wahyu Wibisana, dan Abdul Hamid Samhudi, BA, dalam misi kesenian tersebut diadakan pertunjukan kesenian Sunda.<sup>29</sup> Selain dalam hal pertunjukan kesenian Paguyuban Pasundan juga aktif dalam berpartisipasi pada seminar-seminar yang mengangkat tema seputar budaya di Jawa Barat, salah satunya adalah Seminar Sejarah dan Kebudayaan Cirebon yang juga disponsori oleh Universitas Pasundan pada bulan April 1990.<sup>30</sup> Dalam hal bahasa Paguyuban Pasundan cukup aktif dalam berpartisipasi. Salah satunya dalam Kongres Basa Sunda tahun 1988 yang diadakan atas inisiatif Lembaga Basa dan Sastra Sunda (LBSS)

<sup>27</sup> PB Paguyuban Pasundan. 2000. *Op. Cit.*, Hal: 351

<sup>28</sup> Saat ini jumlah sekolah dasar dan menengah yang berada dibawah YPDM Pasundan adalah 111 unit

<sup>29</sup> PB Paguyuban Pasundan. 2000. *Op. Cit.*, Hal: 351

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Iip D Yahya

yang juga didukung oleh beberapa tokoh budayawan Jawa Barat.<sup>31</sup>

Kegiatan Budaya dapat menjadi indikator yang dapat merujuk langsung pada etnonasionalisme dalam organisasi ini, melalui kegiatan budaya terlihat orientasi organisasi terhadap identitas-identitas diri yang membedakan etnis Sunda dari etnis lain. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Paguyuban Pasundan diatas menunjukkan bahwa Paguyuban Pasundan sangat peduli terhadap kelestarian budaya etnisnya. Namun demikian kegiatan dalam bidang budaya tidak sebanding dengan perkembangan dalam bidang pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa etnonasionalisme tidak hanya identik dan harus disalurkan melalui hal-hal yang mengikat etnis tersebut, melainkan juga aspek lain yang menjadi kebutuhan yang lebih besar untuk masa depan generasi etnis Sunda.

Kelompok yang dibangun berdasarkan semangat etnisitas, secara psikologis terdapat keinginan yang dapat mengarahkan etnonasionalisme untuk mengisi kebutuhan dalam dimensi kolektif komunitas tersebut, termasuk dalam hal kesejahteraan. Etnonasionalisme dalam hal ini merupakan hal yang sangat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat karena dapat meningkatkan perkembangan etnis. Paguyuban Pasundan sebagaimana kelompok yang memiliki etnonasionalisme juga mengembangkan kegiatan-kegiatannya dalam bidang ekonomi sebagai salah satu cara dalam membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sejak tahun 1995, Paguyuban Pasundan sudah mulai merintis dan mengembangkan hubungan dengan perusahaan, koperasi dan lain lain di luar Paguyuban Pasundan. Pada tanggal 3 September 1990 Paguyuban Pasundan telah berhasil mendirikan Koperasi Karyawan Yayasan Paguyuban Pasundan, dan pada tahun 1995 Paguyuban Pasundan juga mendirikan Koperasi Sekunder Paguyuban Pasundan.<sup>32</sup> Selain pendirian-pendirian koperasi Paguyuban Pasundan juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka memajukan perekonomian di wilayah Jawa Barat, seperti kegiatan Khursus Keterampilan Wanita yang dilaksanakan oleh Bidang Kewanitaan Paguyuban Pasundan dan Penataran Kemandirian dan Kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Bidang Kepemudaan dan Olahraga Paguyuban Pasundan.<sup>33</sup> Adapun kerjasama Paguyuban Pasundan dilakukan dengan beberapa PT, diantaranya kerjasama dengan PT. Pengharapan Baru pada tahun 1990 atas usaha YKP ( Yayasan Kesejahteraan

<sup>31</sup> PB Paguyuban Pasundan. 2000. *Op. Cit.*, Hal: 350

<sup>32</sup> PB Paguyuban Pasundan. 2000. *Ibid.*, Hal: 404-406

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Iip D Yahya

Pasundan).<sup>34</sup> PT. Pengharapan Baru kemudian dibeli oleh YKP dan sejak saat itu PT. Pengharapan Baru menjadi milik Paguyuban Pasundan. Pada tahun yang sama YKP juga menjalin kerjasama dengan PT. Karang Arum dalam membangun perumahan *Bumi Pasundan Asri* yang terletak di Jalan. Cijambe-Ujung Berung Kabupaten Bandung. Selain itu pada tahun 1995 Paguyuban Pasundan juga melakukan kerjasama dengan PT. Pupuk Kujang.<sup>35</sup>

Kepedulian pada dasarnya merupakan salah satu aspek yang mendorong seseorang atau kelompok untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang atau kelompok lain. Namun dalam pertimbangan sebelum munculnya kepedulian tersebut, terdapat hal-hal tertentu yang melatarbelakanginya, salah satunya adalah kesamaan identitas termasuk budaya. Kegiatan di bidang sosial yang merupakan salah satu wahana bagi Paguyuban Pasundan dalam menyalurkan kepeduliannya terhadap etnis Sunda, Paguyuban Pasundan meningkatkan kegiatannya dalam YKP (Yayasan Kesejahteraan Pasundan), sebuah yayasan sosial yang telah berdiri sejak tahun 1980.<sup>36</sup> Kegiatan-kegiatan yang dilakukan yayasan tersebut adalah kegiatan sosial seperti berpartisipasi pada Hari Raya Idul Adha dengan mengelola Qurban, mengadakan khitanan masal, membantu orang-orang yang terkena musibah, misalnya pada saat Banjir di Cigudeg-Bogor tahun 1988.<sup>37</sup> Selain itu kegiatan sosial juga mulai ditingkatkan dalam hal pendidikan dengan cara mengadakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan masyarakat di seluruh perguruan tinggi dibawah YPT Pasundan sejak tahun 1985. Pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 Paguyuban Pasundan terlibat aktif dalam kajian-kajian dengan tema Pembangunan Jawa Barat di Pemda Tingkat I Jawa Barat. Selain itu Paguyuban Pasundan juga aktif dalam kajian lintas organisasi seperti dengan KADAMAS, ISEL, LSM-LSM, dan sebagainya. Pada tahun 1995 Paguyuban Pasundan juga mendirikan Biro Hukum Paguyuban Pasundan.<sup>38</sup>

Etnonasionalisme Paguyuban Pasundan mencakup segala aspek dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam bidang agama yang tidak luput dari perhatian Paguyuban Pasundan untuk mendirikan lembaga lembaga yang menunjang kegiatan keagamaan masyarakat seta

mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Lembaga tersebut salah satunya lembaga Baitul Maal Paguyuban Pasundan sebagaimana tertuang dalam SK Pengurus Besar Paguyuban Pasundan No.01/PB/C/1991 tanggal 14 Januari 1991 yang dilengkapi dengan SK Pengurus Besar Paguyuban Pasundan No. 007/PB.A/1991 tanggal 14 Januari 1991 tentang petunjuk pelaksanaannya.<sup>39</sup> Selain itu Paguyuban Pasundan juga memiliki ketertarikan dalam hal penyelenggaraan pendidikan islam dengan mendirikan Pondok Pesanteren dan Masjid Paguyuban Pasundan di Cianjur pada tahun 1990 ( SK PB No.01/PB.0/1990 ).<sup>40</sup> Pada masa bakti 1995-2000 Paguyuban Pasundan juga mendirikan Mendirikan Lembaga Dakwah Islam LDI Paguyuban Pasundan dan mendirikan masjid Paguyuban Pasundan di Banjaran.<sup>41</sup> Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan Paguyuban Pasundan dalam bidang agama dilakukan oleh bidang-bidang yang berada dibawah Paguyuban Pasundan seperti dilakukan dalam Bidang Kepemudaan dan Olahraga dengan kegiatan Seminar Pengkajian Islam dan Dialog Ramadhan.<sup>42</sup>

Etnonasionalisme merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh Paguyuban Pasundan yang sejak awal berdirinya telah membawa latarbelakang etnis dalam pergerakan organisasi. Dalam menghadapi kebijakan Asas Tunga Pancasila, Paguyuban Pasundan memilih untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal dalam berorganisasi, dan ikut meyakini bahwa kebijakan tersebut merupakan cara yang baik untuk menempuh persatuan nasional. Paguyuban Pasundan meyakini bahwa Pancasila merupakan ideologi nasional yang baik, adil, dan membawa kemajuan bagi negara termasuk etnis Sunda. Paguyuban pasundan meyakini bahwa Pancasila dapat menyatukan berbagai macam kelompok masyarakat, memberikan arah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi pedoman bertingkahtlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menjadi pengokoh integrasi bangsa Indonesia.

## PENUTUP

### Simpulan

Sejak berdiri pada 1914 hingga masa Orde Lama, Paguyuban Pasundan mengiringi etnonasionalismenya dengan kegiatan politik sebagai rasa kepedulian dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam bagian ketatanegaraan Indonesia. Namun ketidakmampuan Paguyuban Pasundan dalam memenangkan hati masyarakat Indonesia menyebabkan organisasi ini mengubah arah pergerakannya pada bidang sosial-budaya.

<sup>34</sup> Merupakan yayasan kesejahteraan rakyat (YAKESRA) yang didirikan pada tahun 1980 kemudian diubah namanya menjadi Yayasan Kesejahteraan Pasundan (YKP) pada tahun 1990.

<sup>35</sup> PB Paguyuban Pasundan. 2000. *Op. Cit.*,

<sup>36</sup> Awal berdirinya yayasan ini bernama YAKESRA (Yayasan Kesejahteraan Rakyat)

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Iip D Yahya

<sup>38</sup> *Ibid.*,

<sup>39</sup> PB Paguyuban Pasundan. 2000. *Op. Cit.*,

Hal: 404

<sup>40</sup> *Ibid.*,

<sup>41</sup> *Ibid.*, Hal: 406

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Iip D Yahya

Sejak mundur dari perpolitikan Indonesia, Paguyuban Pasundan mengarahkan etnonasionalismenya bagi perkembangan dan kemajuan etnis sebagai bagian dari upaya mensejahterakan Indonesia.

Kebijakan Asas tunggal Pancasila sebagai bagian dari usaha pemerintah untuk mencapai kestabilan nasional diterima oleh Paguyuban Pasundan. Penerimaan tersebut dilakukan dengan penyesuaian terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan diikuti dengan penyesuaian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Paguyuban Pasundan. Paguyuban Pasundan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya setelah kongres tahun 1985, dan disahkan pada tahun 1990, kemudian mendapat Surat Keputusan Menteri Kehakiman pada tahun 1992.

Menyikapi etnonasionalismenya, Paguyuban Pasundan memilih jalan yang bersifat integrative terhadap pemerintah dan negara. Paguyuban Pasundan pada era penerapan Asas Tunggal Pancasila menitikberatkan kegiatannya dalam bidang pendidikan. Bidang Pendidikan dipandang sebagai jalan yang paling baik untuk mengembangkan semangat etnisitas yang dapat memberikan manfaat bagi etnis Sunda dan bagi organisasi di masa depan. Bidang budaya, sosial, ekonomi dan agama tetap dijalankan dengan baik oleh Paguyuban Pasundan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meskipun ruang lingkupnya dalam wilayah lokal, Paguyuban Pasundan memiliki prinsip bahwa mensejahterakan masyarakat Jawa Barat merupakan bagian dari usaha mensejahterakan Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1985 (No.1-76). *Undang-Undang No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Departemen Penerangan RI: Proyek Pusat Publikasi Pemerintah.

PB Paguyuban Pasundan. 1980. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Paguyuban Pasundan tahun 1980-1985*. Bandung: PT. Pengharapan Baru

PB Paguyuban Pasundan. 1990. *Putusan-putusan Kongres tahun 1990*. Bandung: PT. Pengharapan Baru

PB Paguyuban Pasundan. 1990. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Paguyuban Pasundan tahun 1990-1995*. Bandung: PT. Pengharapan Baru

PB Paguyuban Pasundan. 1995. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Paguyuban*

*Pasundan tahun 1985-2000*. Bandung: PT. Pengharapan Baru

Ingleson, John. 1983. *Jalan ke Pengasingan (Pergerakan Nasionalis Indonesia tahun 1927-1934)*. Jakarta: LP3ES.

PB Paguyuban Pasundan. 2000. *Paguyuban Pasundan ( Kiprah dan Perjuangannya dari Zaman ke Zaman 1914-2000)*. Bandung

Pringgodigdo, A.K.. 1980. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.

Ricklefs ,M.C.1998. *Sejarah Indonesia Modern*.Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Sekretariat Negara RI. 1986. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949*. Jakarta:\_\_\_\_\_

Soeryawan, R.Djaka. 1990. *Sejarah Berdirinya Paguyuban Pasundan*. Bandung: Lembaga Kebudayaan Universitas Pasundan.

Suharto.2002. *Pagoejoeban Pasoendan 1927-1942*.Bandung: Satya Historika.

Suhartono. 1994. *Sejarah Pergerakan Nasional (Dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945)*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syamsudin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.